

GOOD PUBLIC GOVERNANCE, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Franceline Chrisentia Ivena Caesaratri¹, Firma Sulistiyowati²

^{1 2}Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi

Universitas Sanata Dharma, Jl. Affandi, Mrican, Tromol Pos 29, DIY 55002, No.
telp (0274) 513301. E-mail: humas@usd.ac.id

ABSTRACT

The performance of local government is influenced by good governance and an adequate government internal control system. This research aims to determine the effect of implementing good public governance and internal control systems on local government performance. The principles of GPG discussed in this research include the principle of democracy, the principle of transparency, the principle of accountability, the principle of legal culture, and the principle of fairness and equality. This research was conducted at regional organizations in Purworejo Regency with a total of 92 respondents. The method used in this research is descriptive quantitative which will describe the influence between two independent variables on the dependent variable. The data collection method is done by distributing questionnaires to respondents. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this research show that good public governance influences regional government performance, while the internal control system has no influence on regional government performance.

Keywords: good public governance, internal control system, performance.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya riset ini untuk mengetahui pengaruh implementasi *good public governance (GPG)* dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. Kelima asas dalam GPG akan dibahas dalam studi ini, yaitu asas demokrasi, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas budaya hukum, dan asas kewajaran dan kesetaraan. Riset ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 92 orang yang bergabung dalam organisasi perangkat daerah Kabupaten Purworejo. Metoda deskriptif kuantitatif dipakai dalam studi ini untuk menguji pengaruh antara dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good public governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: good public governance, system pengendalian intern, kinerja.

PENDAHULUAN

Setiap organisai tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai sehingga setiap organisasi

pasti memiliki visi, misi, dan strategi untuk mewujudkan suatu tujuan organisasi tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu tujuan atau rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan dalam kegiatan operasi organisasi adalah dengan mengukur kinerja. Setiap organisasi termasuk organisasi sektor publik perlu mengetahui kinerjanya untuk mengetahui hasil pencapaiannya.

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tidak mementingkan laba dalam tujuannya. Organisasi sektor publik lebih berfokus pada bidang pelayanan dan mementingkan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu organisasi sektor publik yang terbesar adalah pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pelayanan yang baik kepada publik oleh instansi atau dinas pemerintahan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat karena pelayanan publik ini bisa menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas kinerja pemerintah oleh masyarakat.

Namun kenyataannya, pemberian pelayanan publik belum sepenuhnya mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Masyarakat masih banyak yang menyampaikan keluhan dan kritikan atas pelayanan yang mereka dapatkan. Pola pikir dan sikap masyarakat yang mulai kritis menuntut pemerintah agar melakukan perubahan dan memperbaiki kualitas kinerjanya dalam melayani kepentingan publik. Hal ini tentunya perlu dilakukan supaya tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penataan kembali sistem pemerintahan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menanggapi tuntutan-tuntutan yang diberikan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Munculnya konsep *good public governance* dikarenakan kinerja pemerintah sebagai yang dipercayai menyelenggarakan urusan publik kurang efektif. Pemerintahan yang berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan Negara yang teratur dan akan mewujudkan *good public governance* yang diharapkan. *Good public governance* dikhususkan untuk organisasi sektor publik dan digunakan sebagai pedoman dasar organisasi publik dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Selain itu, perbaikan kualitas pelayanan pemerintah juga perlu memperhatikan kualitas pengendalian internnya. Menjalankan sistem pengendalian intern dengan tepat, berguna untuk mengarahkan dan mengontrol setiap instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan pencapaian sasaran secara tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Sistem pengendalian intern dinilai mampu membenahi kinerja pemerintah agar instansi mampu mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan tiap tahunnya. Semakin tinggi sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka akan berdampak baik terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good public governance* terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai dengan asas-asas *good public governance* berdasarkan KNKG 2008. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purworejo berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kinerja

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dalam *good governance*, masyarakat harus merasakan dampaknya melalui pelayanan publik yang prima, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dapat dipercaya.

Good Public Governance

Keberadaan *good public governance* dimaksudkan agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya dan dapat mencapai tujuan pemerintah yaitu menjunjung tinggi keinginan dan kehendak rakyat serta menciptakan keadilan sosial (KNKG, 2008). Sebagai pedoman dasar, tentunya *good public governance* memiliki asas-asas yang perlu ditaati oleh pemerintah. Di dalam setiap asas tersebut juga terdapat pedoman pelaksanaan yang wajib dilakukan bagi setiap instansi organisasi publik, diantaranya:

Asas Demokrasi

Dalam pelaksanaan GPG masyarakat memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan negara. Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan publik (KNKG, 2008).

Kinerja pemerintah dinilai baik jika mampu mendengar hingga menyalurkan aspirasi masyarakat. Penyusunan peraturan melibatkan partisipasi masyarakat. Adanya campur tangan dari masyarakat inipun karena pada dasarnya demokrasi sendiri memberikan pemahaman bahwa sebuah kekuasaan berasal dari rakyat. Rakyat sendiri yang akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka sendiri.

Asas Transparansi

Transparansi dipahami sebagai kebebasan dalam memperoleh informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan adanya pengawasan dengan partisipasi dari masyarakat. Transparansi juga merupakan prinsip yang menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang dimaksud meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Apabila dalam suatu instansi pemerintahan tidak transparan, akan menimbulkan hilangnya kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat mengurangi partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi pemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Setidaknya ada tiga indikator keberhasilan penilaian pelaporan keuangan pemerintah. Pertama, adanya transparansi pengelolaan keuangan. Kedua, terdapat kepatuhan serta kesesuaian pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Ketiga, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Asas Budaya Hukum

Mengandung unsur penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran.

Asas Kewajaran dan Kesetaraan

Mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan yang setara. Penyelenggara lembaga negara harus memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan *good public governance* pada kegiatan operasional pemerintah pastinya membantu pemerintah dalam mencapai tujuan instansi dengan menjalankan tugas dan fungsinya. Tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya dapat kita ukur dari kinerja yang telah mereka lakukan. Asas-asas dalam *good public governance* mendorong efektivitas penyelenggaraan negara. Asas *good public governance* akan mengatur tentang hubungan pemerintah dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat sendiri mampu menilai kesuksesan instansi melakukan pelayanan publik yang diberikan. Masyarakat menilai bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berbanding lurus dengan kinerja pemerintah yang meningkat pula. Penerapan *good public governance* berpengaruh pada kinerja pemerintah karena penerapan *good public governance* yang baik dan maksimal dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah dibentuk berguna untuk mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Alur kegiatan pemerintah yang panjang memiliki kemungkinan terjadinya penyimpangan dan tindakan yang dapat merugikan negara. Adanya penerapan pengendalian intern akan tercipta kegiatan yang efektif dan efisien yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik pada setiap alur kegiatan pemerintah dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, serta kajian teoritis yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: *Good Public Governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

H₂: Sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

METODA

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengetahui kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo tentang penerapan *good public governance* dan sistem pengendalian intern. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada aparatur OPD Kabupaten Purworejo terutama para pejabat struktural dinas. Kuesioner yang kembali dari responden dan dapat diolah sejumlah 92 kuesioner. Dari kuesioner yang telah disebar dapat diperoleh karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

Tabel 1. Tabel Karakteristik Usia Responden

Keterangan	Jumlah
Dibawah 40 tahun	18
41 - 50 tahun	30
Diatas 50 tahun	44
Jumlah Sampel	92

Sumber: Data yang diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui karakteristik usia responden. Responden berusia dibawah 40 tahun sebanyak 18 orang, yang berusia 40 sampai 50 tahun berjumlah 30 orang, dan sebanyak 44 responden diketahui berusia lebih dari 50 tahun.

Tabel 2. Tabel Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah
Jenis Kelamin	
Perempuan	46
Laki-laki	46
Jumlah Sampel	92

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel 2 menampilkan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Dapat diketahui jumlah perempuan dan laki-laki mendapat hasil yang sama. Sebanyak 46 orang perempuan dan 46 orang laki-laki.

Tabel 3. Tabel Karakteristik Tingkat Pendidikan

Keterangan	Jumlah
Tingkat Pendidikan	
SMA	1
DIPLOMA	4
S1	41
S2	46
Jumlah Sampel	92

Sumber: Data yang diolah, 2023

Tabel 3 diatas, disajikan data karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Dapat diketahui responden didominasi dengan tingkat pendidikan terakhir S2 sebanyak 46 orang. Responden dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 41 orang, 4 orang dengan tingkat pendidikan diploma, dan hanya 1 orang responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA.

Instrumen penelitian ini mengukur tiga variabel yaitu, kinerja pemerintah sebagai variabel dependen dan variabel independennya adalah *good public governance* (GPG) dan sistem pengendalian intern (SPI). Instrumen kinerja mengacu pada penelitian Christy (2020), instrumen tentang GPG mengacu pada KNKG (2008), instrumen tentang SPI diperoleh dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi berganda untuk melihat pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen.

HASIL

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian h_1 dan h_2 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Regresi Linier Berganda

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
1 (Constant)	6,317	2,588		2,441	0,017

<i>Good Public Governance</i>	0,299	0,72	0,5	4,129	0,000
SPI	0,103	0,54	0,299	1,892	0,062

a. *Dependent Variable: KINERJA*

Sumber: Data olahan SPSS (2023)

Diketahui dari tabel 4, nilai konstanta sebesar 6,317, variabel GPG sebesar 0,299, dan untuk variabel SPIP memiliki nilai sebesar 0,103. Hasil ini jika dituliskan kedalam persamaan regresi menjadi $Y = 6,317 + 0,299x_1 + 0,103x_2 + e$. Berdasarkan hasil dalam tabel 4 menarik kesimpulan bahwa hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa *Good Public Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah ditolak, karena nilai sig 0,000 < 0,05. Maka kesimpulan yang bisa diambil adalah *Good Public Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah. Kesimpulan yang berbeda terjadi pada variabel sistem pengendalian intern. Hipotesis nol (H_0) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah justru menunjukkan hasil yang mendukung, sebab nilai sig 0,062 > 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

Simpulan

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang pengaruh penerapan GPG dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah. Berdasarkan pembahasan diatas, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan bahwa *good public governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah di Kabupaten Purworejo terdukung. Hal ini disebabkan karena penerapan tata kelola sektor publik yang baik yang meliputi akuntabilitas, transparansi, demokrasi, kewajaran dan kesetaraan, serta budaya hukum akan memengaruhi kinerja organisasi pemerintah. Oleh karena itu, GPG harus terus menerus diimplementasikan ke seluruh aspek OPD agar kinerja pemerintah daerah terus meningkat.

Namun dari hasil analisis data, H_2 yang memprediksi bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purworejo tidak terdukung. Penelitian lain yang juga menunjukkan hasil yang sama menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern sudah diterapkan dengan baik namun belum berfungsi dengan efektif (Sopian dan Suwartika; 2019). Dalam hasil penelitian Christy (2020) mengenai pengaruh penerapan *good governance* sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah Kota Yogyakarta, memberikan simpulan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki cakupan yang luas karena dilakukan di seluruh OPD sehingga menyebabkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah sulit dijalankan yang menyebabkan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

Menurut Mukti (2019) tentang implementasi sistem pengendalian internal pemerintah oleh badan pengawas keuangan dan pembangunan dan inspektorat di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan SPI antara lain: *standard operating procedure* yang belum sempurna, pengawasan belum efektif, rekomendasi tidak ditindaklanjuti, terlambatnya laporan keuangan dinas, pendendalian aset dan komunikasi yang lemah, kurangnya komitmen, kepemimpinan yang tidak kondusif, serta sumber daya manusia yang lemah. Dari beberapa penelitian yang mendukung, tidak didukungnya penerapan sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Purworejo disebabkan karena kurangnya kegiatan *monitoring* atau tindak lanjut secara berkala atas hasil pengawasan kinerja pemerintah.

Keterbatasan

Dalam melakukan peneliti mendapati keterbatasan pada saat pengambilan data di lapangan. Peneliti tidak dapat bertemu langsung dengan target responden yaitu kepala dinas dan para kepala bagian dari OPD terkait. Banyak responden yang sedang tugas luar sehingga tidak bisa ditemui dan hanya menitipkan kuesioner pada bagian sekretariat. Hal ini juga menjadi banyaknya kuesioner yang tidak dikembalikan sesuai dengan jumlah kuesioner yang telah dititipkan dengan alasan responden belum kembali.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya, pemilihan jangkauan objek penelitian sangat berpengaruh bagi kelancaran penyebaran kuesioner. Sebaiknya dalam penyebaran kuesioner terlebih bagi responden yang menjabat sebagai pejabat struktural, menurut peneliti lebih baik dilakukan dengan bertemu langsung dan perlu menanyakan jadwal sehingga dapat bertemu. Pengisian kuesioner dengan ditunggu memang lebih memakan waktu yang lebih lama, namun memberikan hasil yang lebih berkualitas.

DAFTAR REFERENSI

- Amar, Muh Ikhsan. 2020. "Sisten Penilaian Kinerja Aparat Pemerintah Desa Dengan Metode *Profile Matching*". *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*. Vol. 6. No. 1: 31-36.
- Astuti, Retno Widia. 2020. "Pengaruh *Good Public Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Ambon". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 6. No. 2: 39-51.
- Bupati Polewali Mandar, Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 41 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
- Christy, Irene Sekar Lintang. 2020. "Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2008. Pedoman Umum *Good Public Governance* Indonesia. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Latupeirissa, Misella Agnesia. 2021. "Pengaruh Penerapan *Good Public Governance* Terhadap Kepuasan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta". Skripsi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Mukti, Hagi Hutomo. 2019. "Impementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Perspektif: PP. No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)". *State Law Review*. Vol. 2. No. 1: 28-43.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial. Gava Media, Yogyakarta. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis, edisi 6 Buku 1. Salemba Empat, Jakarta Selatan.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. Metode Penelitian untuk Bisnis, edisi 6 Buku 2.
- Sopian, Dani dan Wawat Suwartika. 2019. "Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan". *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*. Vol. XI. No. 2: 40-53.
- Tri Basuki, Agus dan Nano Prawoto. 2016. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. Rajawali Pers, Jakarta.